

USAI JALANI SIDANG ETIK

Ketua KPK Pilih Irit Bicara

JAKARTA (KR) - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK Firlil Bahuri. Usai menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik terkait penggunaan helikopter mewah, Firlil irit bicara.

"Kita ikuti saja ya," ucap Firlil saat dikonfirmasi awak media seputar sidang etik yang telah dijalaninya di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Gedung KPK lama di Jakarta, Jumat (4/9).

Sidang lanjutan etik ini, menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, masih beragendakan pemeriksaan saksi-saksi. "Informasi yang kami terima, saksi-saksi yang dipanggil majelis sidang etik diagendakan ada empat orang yang berasal dari internal maupun eksternal KPK," jelasnya.

Seperti diketahui, sidang lanjutan etik Firlil sedianya digelar Senin (31/8). Namun, hal itu ditunda setelah KPK mengambil kebijakan bekerja di rumah untuk seluruh pegawainya selama tiga hari mulai Senin (31/8) sampai Rabu (2/9) menyikapi jumlah pegawai yang positif Covid-19 terus bertam-

bah. Sebelumnya pada Selasa (25/8), Firlil juga telah hadir dalam sidang etik tersebut, namun ia enggan menjelaskan isi sidang etik yang telah dijalaninya itu.

Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firlil tersebut diadakan MAKI ke Dewas KPK, Rabu (24/6). Pada Sabtu (20/6), Firlil melakukan perjalanan dari Palembang ke Baturaja Sumatera Selatan untuk kepentingan pribadi keluarga, yakni ziarah ke makam orangtuanya.

Perjalanan tersebut menggunakan sarana helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO berkategori mewah (helimousine). MAKI menilai perbuatan Firlil tersebut bertentangan dengan kode etik pimpinan KPK yang dilarang bergaya hidup mewah.

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris dalam keterangannya mengungkapkan, sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPK Firlil Bahuri, berlangsung pukul 09.00 WIB. Selain itu, ia menyebutkan, ada empat saksi yang akan dihadirkan dalam sidang etik. (Fu)-d

PRESIDEN PERINTAHKAN TNI-POLRI

Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Panglima TNI, Kapolri dan sejumlah menteri serta kepala lembaga lainnya dan kepala daerah untuk turut mengawasi penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Instruksi tersebut ditujukan kepada sejumlah menteri, Panglima TNI, Kapolri, kepala lembaga serta gubernur, bupati dan walikota agar bersama-

sama melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19," kata Juru Bicara Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia di Jakarta, Jumat (4/9).

Dijelaskan, perintah itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol

Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Diakui, Inpres tersebut sudah ditekan Presiden Jokowi pada 4 Agustus 2020. Inpres tersebut juga mengatur mengenai sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Inpres juga menginstruksikan agar kepala daerah menyusun petunjuk pelaksanaan dalam bentuk peraturan gubernur/bupati/walikota.

(Sim/Ati)-f

Pilkada

bulan lalu yang membuat DIY *gumregah*. Lalu yang perlu ditunggu adalah momen ketika kampus siap kembali membuka diri secara penuh.

"Dalam dua momen liburan itu, aktivitas ekonomi di DIY bergerak bagus selama 3-4 hari, jalan macet, parkir hotel tidak ada yang sepi. Untuk kampus, masih harus banyak pertimbangan terkait aspek kesehatan, apalagi kampus-kampus besar yang sekarang masih kuliah daring. Kita tidak ingin universitas menjadi klaster baru Covid-19," terang Amirullah.

Sementara itu Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan BPD DIY untuk berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi DIY



KR-Basuki Rahardjo
Dirut Bank BPD DIY Santoso Rohmad (kanan) dan Wakil Dekan FEB UGM Amirullah Setya Hardi.

adalah melalui program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM dan Kredit Pemberdayaan Ekonomi Daerah (PEDE). "Program KUR yang digulirkan saat ini sudah tersalurkan bagi 22.361 nasabah. Lalu ada PEDE

yaitu kredit ultra-mikro yang disalurkan kepada perorangan yang mempunyai usaha produktif dan tergabung dalam kelompok. Program-program ini kami gulirkan agar masyarakat bertumbuh ekonominya," ungkap Santoso. (Bro/Awh)-f

KPK

Kejaksanaan Agung telah menetapkan Jaksa Pinangki Sima Malasari, Djoko Soegiarto Tjandra dan Andi Irfan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi atas penerimaan gratifikasi. Sejauh ini jaksa penyidik Kejagung sudah menggeledah empat lokasi terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Jaksa Pinangki Sima Malasari.

Empat lokasi itu adalah dua unit apartemen di Jakarta Selatan, satu lokasi di kawasan Sentul Jawa Barat dan satu dealer mobil. Dari penggeledahan tersebut, Kejagung menyita sebuah mobil mewah BMW milik Pinangki. Sebe-

lumnnya Jaksa Pinangki Sima Malasari juga telah diperiksa penyidik Bareskrim Polri di Gedung Bundar Jampidsus Rabu (2/9). Namun Pinangki diperiksa sebagai saksi untuk kasus Djoko Tjandra yang disidik Bareskrim. Saat itu penyidik Polri menggali informasi mengenai dugaan aliran dana dari Djoko Tjandra ke Pinangki.

Pada bagian lain, penyidik Kejagung juga masih mengumpulkan alat bukti dan kesaksian keterkaitan pengusaha berinisial R, dalam skandal suap dan gratifikasi terpidana Djoko Tjandra kepada tersangka jaksa Pinangki. (Obi)-f

Merosotnya

Pertanyaan reflektif pertama dijawab melalui evaluasi akademis. Pemda DIY sudah cukup maju. Evaluasi pelaksanaan UUK periode 2013-2017 dilakukan berbasis riset yang holistik. Salah satu tujuan evaluasi itu adalah untuk mengetahui dampak jangka pendek (*output*), jangka menengah (*outcome*) dan jangka panjang (*impact*) pelaksanaan UUK. Riset yang memadukan metode studi dokumen, survei, dan riset kualitatif itu cukup jujur. Riset yang dirilis November 2018 itu melaporkan keberhasilan-keberhasilan (*best practices*) dan kasus-kasus kegagalan (*worst practices*) pelaksanaan UUK.

Dalam momentum sewindu UUK, tradisi evaluasi akademis itu berlanjut. Dewan Pakar Panitia Peringatan Sewindu UUK DIY saat ini sedang merumuskan Indeks Pembangunan Keistimewaan (IPK). Dikomandani Prof Djagal W Marseno, perumusan IPK didesain menjadi parameter untuk mengukur secara lebih sistematis pelaksanaan UUK. Rumusan IPK juga menciptakan partisipasi publik untuk bersama-sama melakukan evaluasi. Jika mekanisme evaluasi berbasis transparansi digital, pelaksanaan UUK semakin terkontrol.

Pertanyaan reflektif yang kedua justru lebih penting. Sebab, Keistimewaan Yogyakarta sejatinya berbicara tentang kontribusi Yogyakarta bagi Indonesia. Menurut Sujanto (1988), Amanat 5 September 1945 adalah

embrio Keistimewaan Yogya. Substansi amanat itu adalah penegasan Sultan HB IX dan Paku Alam VIII bahwa Yogya adalah daerah istimewa di dalam negara RI. Keistimewaan Yogya baru ditegaskan secara konstitusional pada 1950. Sayangnya UU No 3 Tahun 1950 tentang DIY itu belum lengkap.

Sejarah mencatat, sejak Keistimewaan masih embrio, kontribusi Yogya bagi RI sudah sangat besar. Selama 1946-1949 menjadi Ibukota RI. Serangan Umum 1 Maret 1949 membuka jalan bagi pengakuan dunia akan kedaulatan RI. Bahkan menurut catatan KPH Yudahadiningrat, Sultan HB IX membina ayai APBN pertama RI. Meminjam bahasa Slamet Sutrisno, Yogya itu seperti seorang ibu yang dengan penuh perjuangan mengasuh, merawat, dan menyelamatkan bayi Republik Indonesia (KR, 17 Maret 2008).

Pada era Orde Baru (1966-1998), Sultan HB IX berjasa luar biasa dalam upaya pemulihan ekonomi negara yang sedang sangat terpuruk. Berkat beliau, RI mendapat banyak dukungan dana dari berbagai negara. Ironisnya, Keistimewaan Yogya malahan hampir dihapuskan. Selama masa penggodokan RUU Nomor 5 Tahun 1974, DIY dan DI Aceh akan dihapuskan dengan alasan pemerintahan daerah di nusantara harus diseragamkan.

Kontribusi Yogya dalam menggulirkan Gerakan

Satu

Setelah itu, melakukan perjalanan ke Yogyakarta untuk mengikuti ujian tesis di UPN Veteran. Ujian digelar di Gedung Jurusan Teknik Perminyakan, Senin (31/8) siang. "Ujian dilakukan secara tatap muka. Jadi ada kontak erat dengan enam dosen dan dua tenaga pendidik," ucapnya.

Markus mengungkapkan, hasil tes PCR baru diketahui keesokan harinya, Selasa (1/9). Pihak kampus pun langsung diberitahu. "Ternyata diketahui hasil swab positif Covid-19. Kalau dari awal sudah tahu, pastinya ujian itu kami batalkan dulu," ucapnya.

Menurut Markus, ada enam dan dua tenaga pendidik yang berkontak erat dengannya dan segera dijadwalkan melakukan tes usap di rumah sakit. "Selain itu juga ada delapan mahasiswa yang kontak erat dan sudah melakukan rapid test. Baru ada dua mahasiswa yang melaporkan non-reaktif," katanya.

Eko Teguh Paripurno, Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 UPNVY mengatakan, pihak kampus kemudian melakukan sterilisasi dan penutupan sementara gedung salah satu fakultas. Pihaknya berkoordinasi dengan Klinik Pratama yang berada di universitas dan Puskesmas Depok II melakukan penelusuran kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan mahasiswa itu.

"Kontak erat yaitu para dosen yang bertatap muka dan berinteraksi dengan

mahasiswa dengan durasi lama dan juga usianya diatas 50 tahun. Atau mahasiswa yang berinteraksi dengan durasi lama dengan AA. Mereka akan menjalani swab test minggu ini," terang Eko.

Hingga saat ini aktivitas di UPNVY baik di kampus 1 yang berlokasi di Condongcatur dan Kampus 2 di Babarsari masih berjalan normal. Protokol pencegahan dan penularan Covid-19 terus dilakukan dan diperketat. "Kami sedang mempersiapkan kebiasaan baru di lingkungan kampus, beberapa aktivitas baik akademik seperti bimbingan maupun sidang kami lakukan secara luring (tatap muka) dengan protokol yang ketat," katanya.

Sementara itu, jumlah kasus positif Covid-19 di DIY terus bertambah, kali ini kasus terkonfirmasi bertambah 18 kasus maka total menjadi sebanyak 1.525 kasus. Berdasarkan data hasil laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 di DIY ini, setidaknya kasus sembuh mengalami kenaikan lebih banyak sebesar 21 kasus sehingga total kasus sembuh menjadi sebanyak 1.096 kasus.

Juru Bicara (Jubir) Pemda DIY untuk penanganan virus Korona Berty Murtiningsih mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium dan terkonfirmasi positif Covid-19 terdapat tambahan 18 kasus positif maka total kasus positif di DIY menjadi sebanyak 1.525 kasus. Tambah ka-

Pembayaran

"Semoga pengosongan tanah yang sudah dipatok untuk pembangunan jalan tol ruas Yogya-Solo sudah ada pembayaran pada akhir tahun ini, sehingga ada perputaran uang yang besar. Perputaran uang ini setidaknya akan membantu menahan kontraksi tajam perekonomian pada Kuartal III maupun IV tahun 2020," tambah Sultan HB X.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR) atau Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana DIY Krido Suprayitno mengatakan, tahapan pemasangan patok *Right of Way* (RoW) Jalan Tol Yogya-Solo selama dua bulan ini dibarengi pembentukan Tim Terpadu Pengadaan Lahan yaitu Satgas A dan Satgas B. Tim ini sudah turun di lokasi untuk melakukan inventarisasi lahan terdampak mulai dari pengukuran dan sebagainya.

"Kita bekerja paralel, jika Tim Persiapan Proyek Pembangunan Jalan Tol di DIY sedang menyelesaikan pematokan untuk pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo, maka

Tim Terpadu yang dikomandoi Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY memulai proses pengadaan lahannya. Harapannya, paling tidak ada dua desa bisa terbayarkan ganti untungnya pada tahun ini sesuai harapan Pak Gubernur," papar Krido. (Ira)-d

Dompet

| Melalui Transfer | |
|------------------------------|--------------------------|
| 608 Fenty Puspitasari | 50,000.00 |
| 609 NN | 50,000.00 |
| 610 R Tristiana Suryani | 500,000.00 |
| JUMLAH | Rp 600,000.00 |
| JUMLAH | Rp 2,600,000.00 |
| s/d 03 September 2020 | Rp 334,810,000.00 |
| s/d 04 September 2020 | Rp 337,410,000.00 |

(Tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)-f

Siapa menyusul?



Prakiraan Cuaca Sabtu, 5 September 2020

| Lokasi | Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | Suhu C | Kelembaban |
|------------|------|-------|-------|-----------|--------|------------|
| Bantul | | | | | 23-31 | 65-95 |
| Sleman | | | | | 23-31 | 65-95 |
| Wates | | | | | 23-31 | 65-95 |
| Wonosari | | | | | 23-31 | 65-95 |
| Yogyakarta | | | | | 23-31 | 65-95 |

☀️ Cerah ☁️ Berawan 🌫️ Udara Kabur 🌧️ Hujan Lokal 🌧️ Hujan Petir

Budaya Tilik di Masa Pandemi Covid-19



Dwi Pela Agustina, SIKom MA
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

TILIK, film pendek yang diproduksi oleh Ravacana Films bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan DIY ini menjadi buah bibir karena viral diperbincangkan di berbagai media sosial dan dibahas oleh banyak media

mainstream. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengomentari bagaimana film karya Sutradara Wahyu Agung Prasetyo bisa meraup jutaan penonton di kanal Youtube, serta viralnya peran Bu Tejo dalam film tersebut sebagaimana pengamat film, karena saya sejatinya hanya penikmat film. Tentu saja, sebagai penikmat film saya punya persepsi bahwa film tersebut mengangkat sebuah realitas dimana 'tilik' merupakan budaya yang melekat di Indonesia yang notabene masyarakatnya bersifat komunal.

Tilik dalam Kamus Bahasa Jawa diartikan sebagai menjenguk. Kata menjenguk dalam Bahasa Indonesia mengacu pada aktivitas mengunjungi, biasanya orang sakit atau bayi yang baru lahir. Sebagaimana dalam kisah di film Tilik, bahwa ada sekelompok ibu-ibu yang penuh semangat untuk menjenguk bu Lurah di Rumah Sakit, padahal sesampainya di Rumah Sakit ternyata yang bersangkutan tidak bisa dijenguk karena masih dirawat di ruang ICU. Tentu saja, sekelompok ibu-ibu yang rela menumpang truk dan berdiri selama perjalanan menuju Rumah Sakit pun kecewa. Namun hal ini hanya karena salah komunikasi saja antara yang menginformasikan dengan yang memberikan informasi kepada ibu-ibu tersebut. Padahal, kekecewaan tersebut tidak akan muncul jika informasi yang didapat oleh informan (Yu Ning) diterima dengan jelas. Film Tilik tentu saja dibuat jauh sebelum masa Covid-19 melanda karena memang demikian realitas budaya 'tilik' pada masyarakat kita. Masyarakat memiliki rasa sungkan apabila tidak menilik warga lainnya yang sedang sakit, apalagi yang sakit

adalah ibu Lurah karena kegiatan 'Tilik' di masyarakat diaminasi sebagai bentuk kepedulian. Namun bagaimana realitas 'tilik' pada masa pandemi Covid-19? Pembaca tentu sepakat jika saya katakan bahwa untuk melakukan aktivitas 'Tilik' di masa pandemi ini ada protokolnya. Tentu saja, bahkan pengalaman saya pribadi ketika ada teman baru melahirkan atau sakit pasti rasa untuk segera menilik muncul begitu saja. Hal itu sebagai bentuk kepedulian terhadap teman atau kerabat. Bahkan tanpa bertanya apakah bersedia atau tidak dijenguk, saya datang begitu saja, karena asumsi saya bahwa orang dijenguk itu pasti senang. Belakangan saya sadar kalau asumsi tersebut salah. Terlebih lagi di masa pandemi seperti saat sekarang ini. Hal ini membuat saya ketika ingin melakukan aktivitas 'tilik', lebih

berhati-hati, apakah yang bersangkutan bisa dijenguk? Apakah tidak merepotkan? Jika bisa dan tidak merepotkan kapan waktu yang tepat untuk menjenguk? Lalu saya juga menanyakan bagaimana protokolnya apabila ingin menjenguk. Misalnya harus cuci tangan sebelum masuk ke rumah, memakai masker selama menjenguk, jika menjenguk bayi cukup diperlihatkan dari jauh tanpa boleh disentuh, dicium apalagi digendong sebagaimana yang sering dilakukan oleh orang-orang kebanyakan termasuk saya selama ini.

Bahkan ada yang tidak boleh melihat bayinya sama sekali, jadi judulnya saja tilik bayi namun yang ditemui hanya orang tuanya saja. Jika memang demikian maka kita harus bisa memaklumi. Nah, jika jawabannya tidak usah dijenguk, tentu, saya dan anda yang mempunyai jiwa tilik yang tinggi harus berbesar hati menerima, karena bentuk kepedulian tidak hanya dilihat dari kehadiran kita disisinya, namun bisa juga lewat kiriman doa-doa baik, sepekat hampers yang sekarang lagi hits dan unik-unik yang bisa ditemukan di berbagai marketplace online/offline atau sejumlah uang yang tiba-tiba ditransfer ke rekeningnya. Tapi itu pilihan bagi yang memiliki niat menilik, yang jelas pilihannya adalah kita memang harus berdamai dengan segala bentuk perubahan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini, khususnya dalam budaya 'tilik'. Karena pasti ada hikmah dibalik setiap peristiwa sehingga kita harus tetap sehat dan tetap positif thinking.***

